

# MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat



## Buruh Migran Perempuan, Berdaya Dari Desa!

Inisiatif mendorong pemerintah desa dan komunitasnya untuk terlibat dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2013. Inisiatif ini berangkat dari realitas kerentanan pekerja migran (khususnya perempuan) yang mayoritas berasal dari desa. Kasus-kasus buruh migran dimulai sejak dari desa melalui praktik perekrutan tanpa kontrol dan pemalsuan dokumen kependudukan yang masif dan sistematis.

Berangkat dari realitas tersebut, Migrant CARE dengan dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) mendorong pembentukan kelembagaan perlindungan buruh migran Indonesia di tingkat desa dalam entitas DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran). Hingga saat ini, DESBUMI tersebar di 37 desa, 8 kabupaten dan 5 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur). DESBUMI juga telah direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam skema DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif) di 200 desa pada tahun 2017.



Keunikan keberdayaan DESBUMI hadir dari produk-produk yang digagas komunitas

Melalui DESBUMI, dilakukan pengorganisasian komunitas purna migran yang mayoritasnya adalah perempuan. Beragam pilar didorong untuk membangun kelembagaan perlindungan pekerja migran dari tingkat desa. Di antaranya melalui; pembentukan Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran, pengembangan ekonomi alternatif, penguatan kapasitas paralegal, kelembagaan layanan informasi dan dokumen di tingkat desa, hingga sosialisasi dan promosi migrasi aman.

Model kolaborasi DESBUMI melibatkan berbagai unsur baik internal (Pemerintah Desa, penggerak DESBUMI, komunitas buruh migran dan lembaga pendamping) maupun eksternal (Pemerintah Kabupaten/Propinsi, Pemerintah Pusat, Akademisi dan stakeholder lainnya). Inisiatif ini juga mensyaratkan kerjasama multipihak timbal-balik dan setara, inklusif, berbasis pada komunitas buruh migran dan mendorong kepemimpinan perempuan. DESBUMI menjadi bukti nyata *multistakeholder partnership* di level lokal dan komunitas berprinsip "No One Left Behind".



Aksi kolektif kelompok buruh migran mendorong kepemimpinan perempuan dalam advokasi perlindungan buruh migran di tingkat desa



## SEMANGAT PRODUKTIVITAS KELOMPOK

Semangat produktivitas terpancar dari para perempuan purna migran yang tergabung dalam IKAMITA (Ikatan Keluarga Migran Tambakproгатen). Meski terbilang baru, tetapi mereka aktif melakukan kegiatan pelatihan. Tuntutan ekonomi turut menjadi dorongan ibu-ibu di kelompok IKAMITA kian produktif dan kreatif. Beberapa produk yang dihasilkan kelompok ini di antaranya adalah abon dan rangkang muda, sabun cuci piring dan berbagai keripik. Tak jarang pula produk-produk hasil karya purna migran turut terpajang di mal lokal.



Selain IKAMITA, di Kebumen ada pula kelompok SERBUMI yang terkenal dengan produksi Tiwul instan dan Mangglengnya. SERBUMI adalah kelompok buruh migran di Desa Tanggulangin yang beranggotakan buruh migran, purna migran dan anggota keluarganya. Inisiatif memproduksi tiwul berangkat dari kekayaan hasil alam berupa singkong. Sebelumnya singkong hanya dijadikan campuran untuk pakan ternak. Desa Tanggulangin telah berhasil mengakses dana desa berdikari yang digunakan untuk pemberdayaan kelompok buruh migran. Salah satunya adalah pembelian mesin pembuat tepung singkong untuk SERBUMI. (EVI)

## KARYA BATIK PUNA MIGRAN



Membatik adalah salah satu kegiatan kelompok buruh migran Bumi Berkah Abadi di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Sejak dibentuk pada bulan Oktober tahun 2017 lalu, kelompok ini giat mengikuti pelatihan dan melakukan produksi. Mereka memiliki cita-cita untuk dapat membuat batik khas desanya sendiri. Dengan nama motif *Lembah Serayu*, yang menggambarkan hasil bumi Desa Gondang. Keberadaan Kelompok Bumi Berkah Abadi membuat para perempuan purna migran di Desa Gondang dapat mengembangkan keterampilan mereka dengan kegiatan-kegiatan produktif.

Motif  
"Carica"  
pada batik  
karya  
Kelompok  
Bumi Sejati,  
Desa  
Rogojati,  
Kabupaten  
Wonosobo.



Motif khas bukan hanya dimiliki oleh Desa Gondang, tapi juga kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Batik bermotif carica merupakan salah satu yang menjadi ciri khas mereka. Terinspirasi dari hasil bumi yang hanya ada di Wonosobo. Selain berinovasi dengan motif batik khas desanya masing-masing, beberapa kader DESBUMI di Kabupaten Wonosobo juga telah mengantongi sertifikasi pengrajin batik oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (EVI)



## PPT DESBUMI

### Sumber Informasi Migrasi Aman



Desa Juntinyuat telah menjadi Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) sejak tahun 2016. Berdirinya DESBUMI diawali dengan kegiatan pendataan kondisi Pekerja Migran Indonesia di desa ini sebelum-saat-dan setelah bermigrasi.

## SOSOK PEDULI

### Buruh Migran

Berawal dari kasus seorang warganya yang dipulangkan paksa karena tak punya izin kerja, Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok tergerak untuk mengupayakan perlindungan pekerja migran. Didampingi Migrant CARE, pemerintah desa mulai memetakan permasalahan dan aktor-aktor kunci terkait migrasi, hingga DESBUMI Dukuhdempok resmi berdiri pada tahun 2016. Setahun kemudian, Peraturan Desa perlindungan pekerja migran disahkan sehingga desa mampu mengalokasikan sumber daya dan anggaran khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. DESBUMI Dukuhdempok kian menggiatkan upaya pemberdayaan ekonomi agar warga tak sepenuhnya bergantung pada pilihan kerja ke luar negeri. Warga diberikan pelatihan pembuatan makanan opak gulung, keripik tempe, minuman jahe, hingga membuat batik.



Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok

“Perempuan adalah elemen penting dalam pemberdayaan warga. Sebagai mantan pekerja migran, mereka punya banyak ide kreatif untuk menyebarkan informasi migrasi aman dan pemberdayaan ekonomi,” ujar Miftahul. Prestasi DESBUMI Dukuhdempok telah mengantarkan Miftahul ke Jenewa, Swiss untuk bergabung dengan delegasi Indonesia memaparkan gagasan tentang perlindungan pekerja migran di tingkat desa pada sesi ke-27 Komite Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran, September 2017. (MAMPU)

Newsletter ini disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan dari MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Informasi yang disajikan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab Tim Redaksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

# buruh migran menulis

## Pembela Hak-Hak Buruh Migran

Pengalaman yang sangat minim dan umur yang masih belia (kurang dari 18 tahun), saya meniatkan diri untuk mengais rejeki di negara orang dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Proses demi proses saya lewati melalui sponsor. Betapa kagetnya saya saat berada di negara tujuan. Tidak seperti yang saya bayangkan, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Satu bulan bekerja di sana rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Waktu begitu lama sekali berjalan. Saya bekerja di Nasran, Saudi Arabia, dengan satu rumah yang sangat luas dan anggota keluarga yang banyak. Tekad dan niat saya bekerja di luar negeri adalah saya ingin sukses memperbaiki ekonomi sehingga segala tantangan yang saya di sana saya jalani dengan kuat dan sabar. Waktu demi waktu saya lalui sampai lima tahun dan waktu yang ditunggu-tunggu adalah saat kepulangan.

Satu bulan berlalu dirumah saya merasakan perbedaan. Berkat saya bekerja di luar negeri saya bisa membangun rumah dan mencari keberuntungan di sini. Pada tahun 2016 saya dipercaya sebagai staf pemerintahan desa Jufiniyat, keadaan yang sudah mulai stabil dalam hal ekonomi maka saya memutuskan tidak lagi bekerja di luar negeri sebagai PRT. Bergabung dengan DESBUMI Gema Karya Migran Jutinyuat adalah hal yang sangat positif untuk diri saya, kegiatan-kegiatan yang saya ikuti dalam komunitas menjadi hal yang menarik buat saya, banyak hal baru yang saya ketahui. Informasi, motivasi, support yang diberikan oleh tim Migrant CARE menjadi penyemangat saya dalam membela hak-hak buruh migran karena saya sendiri adalah mantan buruh migran. Pemerintah Desa Jufiniyat dalam dukungan program DESBUMI dan Migrant CARE telah mendukung dan membimbing kami dalam membela hak-hak buruh migran.

Penulis  
Diyana 

## Bisa!

Boleh jadi, pengalaman pahit terakhir di Abu Dhabi membuat aku trauma untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Sejak itu terlintas sebuah cita-cita dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi sesama pekerja migran yang tertindas. Sesampainya di tanah air, perjuanganku diawali dari menjadi anggota kelompok perempuan di desaku, kemudian berkenalan dengan organisasi PEKKA dan Perkumpulan Panca Karsa (PPK). Dari pelatihan ke pelatihan, aku mendapat banyak bekal ilmu serta kepercayaan diri, aku mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, terutama yang menyangkut perempuan dan pekerja migran. Hingga pada akhirnya, aku resmi menjadi anggota DESBUMI yang bertugas di Divisi Informasi, dengan tugas ini aku mulai terbiasa berbicara di depan orang banyak, mentalku terus diterpa untuk berhadapan dengan banyaknya masalah yang dihadapi para pekerja migran. Baik itu sejak pra hingga purna penempatan. Aku terus berupaya mensosialisasikan pentingnya bermigrasi secara aman dengan prosedur yang benar, juga dengan dukungan penuh dari suami dan keluarga, serta bimbingan dari PPK aku yakin aku bisa!

Penulis  
Husnul Hidayah 



Diyana merupakan Perangkat Desa yang menjadi bagian dari PPIT dan aktif mengorganisir kelompok buruh migran di Desa Jutinyuat, Indramayu



Husnul Hidayah adalah mantan PRT Migran di Arab Saudi yang kini aktif dalam Kelompok Buruh Migran Gemel Bersatu, Desa Gemel, Lombok Tengah. Ia aktif mensosialisasikan migrasi aman bagi calon pekerja migran dan anggota keluarganya

## 01 PHOTO VOICE



“  
**Untuk menambah penghasilan keluarga  
 sambil menunggu kiriman dari  
 suaminya yang bekerja di luar negeri,  
 mama ini harus bekerja untuk memenuhi  
 kebutuhan hidup.**



## RUMPUT LAUT MENOLONG KEHIDUPAN

Radia adalah seorang ibu dengan 3 anak, tinggal di Desa Tagawiti, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT. Ia adalah mantan buruh migran yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada tahun 2002-2004 di Lahdatu, Sabah. Radia aktif dalam kelompok tani dan kelompok buruh migran di desanya 'Oto Sela'. Kegiatan kelompoknya antara lain menenun dan menggoreng kopi. Selain itu ia juga memiliki hobi berenang.

Di tahun kelima inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) berlangsung, Migrant CARE menyelenggarakan forum bersama yang mempertemukan para penggerak dan semua pihak yang terlibat dalam inisiatif DESBUMI. Forum refleksi dan evaluasi kritis ini dilakukan untuk mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam menggerakkan DESBUMI. Diselenggarakan pada 27 sampai 29 November 2018 lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, DESBUMI Summit menghasilkan Rekomendasi Strategis Penyelenggaraan Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran, diantaranya:

**1 Mendorong Kesiapan Daerah dalam Implementasi UU No.18 Tahun 2017 tentang  
 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)**

**Akselerasi dan Pengawasan Implementasi UU PPMI dan aturan turunannya  
 secara berjenjang dan berkelanjutan**

**2**

**3 Merekognisi dan mendukung keberlanjutan inisiatif lokal dan desa dalam perlindungan pekerja  
 migran Indonesia, serta pemberdayaan purna migran**

**Penguatan perspektif dan keberpihakan pada kepentingan pekerja migran dalam aspek  
 suprastruktur tata kelola perlindungan pekerja migran di tingkat lokal-desa**

**4**

**5 Merekognisi dan mendukung kepemimpinan perempuan melalui program dan aktivitas  
 pendidikan kritis perempuan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

**Keadilan gender dan diversifikasi sosial daerah sebagai basis pelibatan masyarakat dan  
 perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan di tingkat lokal-desa**

**6**



"Kegiatan ini adalah inisiatif untuk mengakumulasi pengalaman dan praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah. Harapannya, inisiatif-inisiatif itu di-scaling up dan direplikasi baik oleh pemerintah nasional, daerah, maupun pemerintah desa, terutama di kantong-kantong buruh migran."

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE

"Ada dua hal yang membuat saya sangat terkesan dengan kegiatan DESBUMI Summit, yang pertama, kita dapat menambahkan wawasan dan berbagi pengetahuan mengenai DESBUMI dan DESMIGRATIF. Kedua, DESBUMI Summit dapat menyatukan penggerak perlindungan pekerja migran dari berbagai daerah, alhasil kami menjadi seperti satu keluarga besar."

Etti Subiyarti, Kepala Desa Rogojati, Wonosobo



# KOLASE

## PHOTO

Kegiatan DESBUMI SUMMIT

### *Eksposure ke Banyuwangi dan Jember*

Wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan buruh migran perempuan. Eksposure di Banyuwangi diadakan di Desa Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo (kiri). Sedangkan eksposure di Jember dilakukan di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan (kanan).



### *Expo Aktivitas Ekonomi Komunitas*



### *Ekspresi Budaya*



### *Seminar Nasional*

"Peta Jalan Menuju Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender dari Desa"



### *Pameran Photo Voice dan Cerita Perubahan*



### *Diskusi Tematik*

Terdapat 6 diskusi tematik yang mendedah isu-isu strategis mulai dari aspek kebijakan, inovasi dan peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan perempuan, sampai agenda pencapaian SDGs.



# 02 PHOTO VOICE

## SENANG DENGAN HASIL PANEN KAMI



“Seorang anak laki kecil ini hendak membantu ibunya mengupas kacang tanah, tapi karena terlalu lapar maka anak langsung makan. Dia sangat senang dengan hasil panen kami. Kacang tanah ini bisa kami jual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sambil menunggu kiriman dari ayahnya. Jika lahan banyak yang dikelola, maka penghasilannya banyak. Kalau sedikit lahan dikelola maka penghasilannya sedikit. Maka bekerja sebagai buruh migran (Malaysia) menambah ekonomi kami.”



BERNADETE LETEK atau biasa disapa Erna, adalah anggota kelompok buruh migran Gleri di Desa Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT. Ibu dari 3 anak ini pernah menjadi buruh migran di Malaysia (1994 – 1999) sebagai ART. Ia merangkap sebagai kepala keluarga karena suaminya bekerja di Malaysia. Erna dijuluki kawan-kawannya sebagai motivator.

# buruh migran menulis

## CERITA PERUBAHAN DARI JEMBER



Ririn Kusuma Ari Widyati adalah purna migran yang saat ini menjabat sebagai anggota BDP di Desa Ambulu, Jember.

Jumiaturun adalah mantan pekerja migran dari Hongkong. Saat ini dia bekerja sebagai guru SD di salah satu sekolah dasar di Desa Dukuhdempok. Dia juga merangkap sebagai ketua PPT DESBUMI di daerahnya. Keaktifannya menjadikannya sering diajak untuk mendapatkan berbagai pelatihan. Setelah aktif di DESBUMI, *Bu Jum*, begitu dia biasa dipanggil, menjadi dekat dengan Pemerintah Desa. Banyak kegiatan yang dilakukan di kantor desanya. Dia juga menemukan wadah untuk berbagi dengan sesama mantan pekerja migran, mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan PMI menjadikannya bisa memberikan informasi yang baik dan aman kepada orang-orang disekitarnya dan dia menjadi lebih percara diri.

Saat ini *Bu Jum* adalah salah satu anggota dari Tim 11 di Desa Dukuhdempok mewakili suara dari perempuan. Ia bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa serta anggota lainnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan penyelarasan program kegiatan masuk desa. Semua yang diraih *Bu Jum* tak lain karena kegigihannya dalam belajar. Organisasi Migrant CARE adalah lembaga yang mendukung dan berjuang untuk hak-hak PMI mendorong ibu-ibu di DESBUMI meningkatkan kapasitas diri, dan saat ini desa pun lebih terbuka dalam mengakomodasi suara perempuan.

Cerita ini dituturkan oleh Jumiaturun, 51 tahun, purna migran asal Dukuhdempok, Jember



Penulis

Ririn Kusuma Ari Widyanti

## Dari yang Tidak Tau Menjadi Tau

Saya dulu cuma seorang ibu rumah tangga, hidup pas-pasan, dan pada tahun 2010 akhirnya saya memberanikan diri pergi ke luar negeri. Padahal waktu itu anak saya baru berumur 18 bulan. Demi biaya anak berobat, saya rela meninggalkannya di usia yang masih balita. Hampir lebih dari lima tahun saya mengadu nasib di negeri Hongkong. Sekarang saya berusaha agar saya tidak pergi lagi ke Hongkong, supaya saya bisa merawat anak, suami, dan orangtua.

Sampai kemudian pada tahun 2016, saya diajak bergabung oleh Migrant CARE bersama ibu-ibu mantan TKI lainnya di desa kami, Desa Kedung Gebang. Kami membentuk sebuah komunitas yang kami beri nama "Sukses Migran". Berawal dari situ kami diajari banyak hal salah satunya membuat kue. Akhirnya saya mencoba berinovasi dari nanas yang saya olah menjadi Cenil Nanas (Cilnas), ternyata disukai banyak orang dan banyak peminatnya.

Awalnya saya jual dari sekolah ke sekolah. Bermodal uang sedikit, saya mulai berinovasi lagi, dari pisang yang saya olah menjadi kuk pisang dan sekarang banyak dikenal dengan sebutan Banana Cake. Dan saya kasih brand biar mudah dikenal dengan sebutan "CILNASTA". Saya posting ke media sosial FB dan Instagram. Dan hasilnya sekarang saya mulai banyak pesanan kue bahkan sekarang saya sudah bisa kirim ke Bali dan keluar negri. Terima kasih Migrant Care saya yang awalnya tidak tau apa-apa sekarang saya tau tentang banyak hal. Dan saya juga sempat diajak gabung di TIM PID (Tim Inovasi Desa).



Penulis

Ita Retna W



Ita Retna adalah penggerak kelompok buruh migran di desanya yang aktif berwirausaha.

## Awig-Awig Batasi Migrasi Non-Prosedural

Sejak Awig-Awig Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kelurahan Gerunung disahkan, aktivitas migrasi tenaga kerja warga Gerunung ke luar negeri menjadi lebih transparan dan terkelola. Tidak ada lagi calo atau PL (Petugas Lapangan) PJTKI yang merekrut pekerja migran secara *ugal-ugalan*. Kelurahan Gerunung berada di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kelurahan ini menjadi salah satu dari lima wilayah Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang dibangun di Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2014 bersama Perkumpulan Panca Karsa (PPK) – Mataram dan Migrant CARE melalui Program MAMPU. Kelurahan yang sekarang dikenal dengan hasil pemberdayaan ikan air tawar ini merupakan wilayah basis pekerja migran di Nusa Tenggara Barat. "Setidaknya ada 300-an warga Kelurahan Gerunung yang masih bekerja di luar negeri," terang Lalu Muhammad Hazni, Kepala Kelurahan (Lurah) Gerunung. Nusa Tenggara Barat sendiri merupakan provinsi terbesar ke-4 yang menjadi wilayah asal buruh migran Indonesia berdasar pendokumentasian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

### Migrasi Aman Sejak dari Kampung Halaman

Hazni menuturkan, sebelum ada DESBUMI, perekrutan buruh migran asal Kelurahan Gerunung cenderung tidak terkontrol dan mengarah pada proses-proses yang non-prosedural. Namun semenjak ada DESBUMI, kelurahan sudah memiliki data mobilitas migrasi warganya, sehingga kelurahan dapat memonitor siapa saja, di mana saja, dan nomor kontak warganya yang bermigrasi ke luar negeri.

Saat ini, Kantor Kelurahan Gerunung menjadi pusat layanan informasi migrasi, pengurusan dokumen (Surat Keterangan dan dokumen kependudukan), pendataan, sampai dengan fungsi paralegal yang dijalankan kader DESBUMI. Inisiatif melembagakan perlindungan pekerja migran melalui DESBUMI juga dirasa mampu memberi pengaruh pada wilayah sekitar maupun pada tataran kebijakan yang lebih tinggi.

Di tingkat kabupaten misalnya, keberadaan Awig-Awig tentang perlindungan pekerja migran di Kelurahan Gerunung yang disahkan sejak tahun 2015, menjadi salah satu instrumen yang mendorong pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Lombok Tengah. Keberadaan fungsi paralegal untuk pengaduan dan pendampingan kasus buruh migran yang ada di Kelurahan Gerunung, juga dapat diakses oleh warga desa/kelurahan lain.



"DESBUMI adalah keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kami hanya bisa melayani dan memfasilitasinya agar pekerja migran asal Gerunung dapat terlindungi."  
(Hazni, Lurah Gerunung)

Selain fungsi paralegal, Kelurahan Gerunung juga mendukung pembentukan komunitas perempuan purna migran beserta aktivitas pemberdayaannya melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bernama Koperasi Cerah Ceria Migran. Komunitas yang beranggotakan 66 orang ini jaktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, salah satunya melalui Musrenbang. Semuanya dilakukan sebagai mandat Awig-Awig untuk mewujudkan migrasi yang aman dan terjamin sejak dari kampung halaman.

\*Awig-Awig merupakan produk kebijakan yang dibuat di suatu wilayah, yang kefentuannya bersifat mengikat seperti Peraturan Desa.



Wahyu Susilo  
Direktur Eksekutif Migrant CARE

## Agenda Kerja Layak Jokowi



Sepanjang Juni hingga Juli 2019, pembicaraan mengenai pekerjaan yang layak terus diperbincangkan dalam berbagai forum. Pada Juni lalu, Konferensi Buruh Internasional di Jenewa mengadopsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional 190 tentang Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi G-20 memperbincangkan kesempatan kerja, ketimpangan, dan ekonomi digital. Pada Juli 2019, dalam Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah Indonesia mempresentasikan Laporan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang salah satunya mengenai perkembangan pencapaian dan tantangan tujuan 8 tentang kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, pada 22-23 Juli 2019, berlangsung Indonesia Development Forum dengan tema "Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Kerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif". Forum kebijakan ini mempertemukan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, mitra pembangunan negara sahabat dan lembaga donor, akademikus, masyarakat sipil, dan kelompok bisnis. Tentu saja forum-forum tersebut sangat berkontribusi dalam memberikan masukan bagi pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, yang akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya, dalam terminologi studi pembangunan, istilah yang tepat untuk prioritas itu adalah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Istilah sumber daya manusia terasa lebih dekat dengan terminologi manajemen perusahaan.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih jauh dari konsep kerja layak ideal. Di atas kertas memang sudah ada sederet paket undang-undang perburuhan, perlindungan pekerja migran, dan anti-perdagangan manusia. Hampir sebagian besar standar perburuhan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan instrumen hak asasi manusia internasional telah diratifikasi. Namun situasi tidak serta-merta berubah ketika sejumlah perangkat legal tersedia. Perkara pengupahan adalah perkara klasik yang tak pernah selesai. Kalangan pekerja menganggap ada kemunduran ketika penetapan besaran upah tidak lagi melalui proses tripartit dan hanya mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kalangan dunia usaha mengeluhkan kekakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap tidak fleksibel dan terlalu berpihak kepada pekerja.

Tentu saja kita tidak menutup mata ada sejumlah kemajuan dalam upaya mewujudkan kerja yang layak bagi kaum pekerja. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang mengintegrasikan seluruh kaum pekerja dalam skema perlindungan sosial, seperti yang digagas oleh ILO melalui Universal Social Protection Floor. Skema tersebut diimplementasikan dalam sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, cakupan penjaminan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya kepada para pekerja di Indonesia, tapi mulai menyasar pekerja migran di luar negeri.

Namun tragedi kebakaran pabrik korek api di Binjai, Sumatera Utara, yang mengakibatkan kematian setidaknya 30 pekerja, telah menunjukkan realitas kerentanan pekerja rumahan. Peristiwa itu juga memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dari lembaga inspektorat ketenagakerjaan. Tragedi tersebut mungkin merupakan puncak gunung es dari kerentanan yang dihadapi jutaan pekerja rumahan yang selama ini belum mendapat pengakuan sebagai pekerja formal. Mereka terjauhkan dari skema jaminan perlindungan sosial dan asuransi ketenagakerjaan.

Tragedi itu juga mengingatkan kita pada pentingnya keseriusan pemerintah dalam memperbarui tata kelola kelembagaan inspektorat ketenagakerjaan yang sudah ketinggalan zaman. Dari kajian tentang efektivitas inspektorat ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Migrant CARE, teridentifikasi beberapa kelemahan. Instrumen pengawasan ketenagakerjaan masih menggunakan metode yang sudah usang. Inspektorat sangat bias pada pengawasan industri manufaktur serta belum mengawasi hubungan industrial yang rumit dalam sistem kerja rumahan dan persiapan pekerja migran. Keterbatasan pelaksana dan kerumitan hubungan inspektorat berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Pekerjaan rumah yang juga harus segera dituntaskan oleh pemerintah adalah mengakhiri kesemrawutan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran, yang ditandai dengan tumpang-tindihnya kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Kementerian Perhubungan terkait dan pekerja di sektor kelautan. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, paling lambat akhir November 2019 harus sudah dikeluarkan peraturan presiden tentang kelembagaan pengganti BNP2TKI serta dua peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengawasan. Jika tidak, perdagangan manusia berkedok penempatan pekerja migran akan terus berlangsung tanpa pengawasan.

Artikel ini telah dimuat di Koran Tempo pada Senin, 15 Juli 2019



**Joko Widodo** ✓  
@jokowi

Perlindungan para buruh migran Indonesia di mana pun berada adalah prioritas bagi pemerintah. Di antaranya berupa penerbitan aturan, juga dukungan berbagai inisiatif lokal perlindungan pekerja migran seperti DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dan DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif)

10:35 PM - 17 Dec 2018

1,162 Retweets 5,372 Likes

322 1.2K 5.4K



“Negara memiliki komitmen yang kuat untuk hadir memberikan perlindungan pekerja migran. Dalam UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah pusat dan provinsi beserta desa telah berbagi peran untuk melindungi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah migrasi.”

Reyna Usman,  
Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan



“Setelah sekian lama, berbagai persoalan telah mendera para Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu saya menyatakan sebuah apresiasi luar biasa kepada Migrant CARE yang telah berdiri tegak menjadi lokomotif penggerak perubahan dengan DESBUMI.”

Jenderal TNI (Purna.) Dr. Moeldoko, S.IP,  
Kepala Staf Kepresidenan RI



“Persoalan perlindungan buruh migran adalah persoalan kita semua. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi program Migrant CARE yang telah merintis perlindungan untuk buruh migran berbasis desa, sehingga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.”

Abdullah Azwar Anas,  
Bupati Banyuwangi



Saya mantan pekerja migran di Hongkong, bersama kawan-kawan DESBUMI memiliki inisiatif untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dengan mengawal dan memastikan mereka berdokumen legkap dan juga memperhatikan anggota keluarganya di desa

Jumiatus,  
Pengerak DESBUMI Dukuhdempok, Jember



Website: [www.migrantcare.net](http://www.migrantcare.net)  
Twitter&Instagram: @migrantcare  
Facebook: MigrantCARE  
Youtube: Migrant CARE



**Kementerian Ketenagakerjaan** ✓  
@KemnakerRI

“DESBUMI bisa menjadi PUSAT INFORMASI, PUSAT PENDIDIKAN, dan PUSAT PELAYANAN bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.”

2:54 AM - 30 Aug 2016

9 Retweets 3 Likes

9 3